

**IMPLEMENTASI APLIKASI E-BMD DALAM MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT**

Muhamad Aldi Rindra N.

NPP. 32.0381

Asdaf Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: aldi.rindranugroho02@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Jatnika Dwi Asri, SE, M.Si, M.Ak

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The management of Regional Government Assets (Barang Milik Daerah/BMD) in Cianjur Regency has encountered several issues, including data discrepancies, delayed reporting, and low accuracy in asset records. Previous studies have primarily focused on manual systems or SIMDA BMD, while research on the implementation of the e-BMD application based on Ministry of Home Affairs Regulation Number 47 of 2021 remains limited, particularly at the district government level. Therefore, this study was conducted to address this research gap by examining the implementation of e-BMD in Cianjur Regency. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the e-BMD application in improving the accountability of Regional Government Asset management in Cianjur Regency. **Method:** This research employed a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were collected through in-depth interviews with eight informants, direct field observations, and document analysis. The data were analyzed using Nilsen's implementation theory and Mahmudi's accountability theory. **Result:** The study revealed that, the organizational environment in Cianjur Regency has gradually embraced digitalization, supported by leadership commitment and well-coordinated organizational structures, the implementation process of the e-BMD application was effective through stages of planning, training, system trials, and continuous monitoring, the application's access control feature successfully enhanced data security and minimized recording errors, and challenges remain, such as limited human resources, suboptimal network infrastructure, and inadequate system socialization across working units. **Conclusion:** In general, the implementation of the e-BMD application in Cianjur Regency has effectively improved the accountability of Regional Government Asset management. The local government has made efforts through technical training, infrastructure optimization, and expanded socialization. Moving forward, it is recommended to strengthen human resource capacity, develop supporting infrastructure, and improve system integration to sustain the e-BMD implementation.

Keywords: e-BMD; Asset Management; Accountability; Information System; Local Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Cianjur selama ini masih mengalami berbagai persoalan seperti ketidaksesuaian data aset, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya akurasi pencatatan aset. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada sistem manual atau penggunaan SIMDA BMD, sementara kajian tentang implementasi aplikasi e-BMD berbasis Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 masih terbatas, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji implementasi e-BMD di Kabupaten Cianjur. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi e-BMD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Cianjur. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori implementasi dari Nilsen dan teori akuntabilitas dari Mahmudi. **Hasil/Temuan :** Penelitian menemukan bahwa lingkungan organisasi di Kabupaten Cianjur mulai terbuka terhadap digitalisasi, didukung komitmen pimpinan dan struktur organisasi yang terkoordinasi, proses implementasi aplikasi e-BMD berjalan efektif melalui tahapan perencanaan, pelatihan, uji coba, dan monitoring berkelanjutan, penerapan kontrol akses berbasis sistem mampu meningkatkan keamanan data aset dan meminimalkan kesalahan pencatatan, dan masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, serta kurangnya sosialisasi ke seluruh unit kerja. **Kesimpulan:** Implementasi aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur secara umum telah efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan teknis, optimalisasi infrastruktur jaringan, dan perluasan sosialisasi. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, dan integrasi sistem yang lebih baik untuk mendukung implementasi e-BMD yang berkelanjutan.

Kata kunci: e-BMD; Pengelolaan Aset; Akuntabilitas; Sistem Informasi; Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif. Barang Milik Daerah bukan sekadar kekayaan daerah, tetapi aset vital yang menunjang operasional pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BMD yang tertib, efisien, dan akurat menjadi syarat mutlak dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (Mahmudi, 2019).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan administrasi pemerintahan dan tuntutan efisiensi birokrasi, pengelolaan BMD tidak hanya dituntut tertib administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sinurat, 2018). Pengelolaan BMD yang lemah berisiko menimbulkan permasalahan serius, mulai dari ketidaksesuaian data aset dengan kondisi fisik di lapangan hingga potensi penyalahgunaan aset daerah. Situasi ini akan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi (Mardiasmo, 2018).

Di Kabupaten Cianjur, permasalahan pengelolaan BMD masih menjadi perhatian khusus. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 2022), meskipun Kabupaten Cianjur berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih ditemukan catatan mengenai ketidaktertiban dalam pengelolaan aset, ketidaksesuaian data pencatatan dengan kondisi fisik, dan keterlambatan pelaporan aset oleh perangkat daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan aset daerah yang lebih modern, akurat, dan terintegrasi.

Sebagai bentuk inovasi dan upaya pembenahan sistem, Pemerintah Kabupaten Cianjur menerapkan aplikasi e-BMD berbasis web yang dirancang untuk menggantikan sistem manual dan aplikasi SIMDA BMD sebelumnya. Kehadiran e-BMD diharapkan mampu menyederhanakan proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset daerah secara real-time, sehingga dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, serta transparansi pengelolaan BMD. Penerapan sistem ini juga merupakan implementasi ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Keberhasilan implementasi aplikasi e-BMD di beberapa daerah lain seperti Kota Bogor dan Kota Depok menjadi contoh nyata bahwa digitalisasi pengelolaan aset mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah (Fadhil, 2022). Dengan melihat potensi tersebut, Kabupaten Cianjur diharapkan dapat mengoptimalkan e-BMD untuk memperbaiki kualitas pengelolaan BMD dan mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Namun demikian, penerapan aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi, infrastruktur jaringan yang belum optimal di seluruh wilayah, serta kurangnya sosialisasi aplikasi kepada perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk menganalisis proses implementasi aplikasi e-BMD, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah strategis agar pengelolaan aset daerah menjadi lebih akuntabel, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi (Suwanda, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul "Implementasi Aplikasi e-BMD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten

Cianjur", dengan harapan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan aset berbasis digital.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi salah satu isu strategis di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2021, meskipun Kabupaten Cianjur berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetap ditemukan sejumlah catatan penting yang berulang dari tahun ke tahun. Catatan tersebut mencakup ketidaktertiban dalam pencatatan aset, ketidaksesuaian data pencatatan dengan kondisi fisik di lapangan, serta keterlambatan dalam pelaporan aset oleh perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme pengelolaan BMD yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendukung prinsip transparansi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Selain permasalahan administratif, hambatan lain yang menjadi tantangan utama dalam optimalisasi pengelolaan BMD di Kabupaten Cianjur adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Rendahnya pemahaman sebagian aparatur terhadap penggunaan aplikasi berbasis digital, seperti e-BMD, berdampak pada lambatnya proses adaptasi dan implementasi sistem pengelolaan aset berbasis elektronik. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya digitalisasi tata kelola aset daerah yang efektif dan terintegrasi.

Tabel 1. 1
Opini BPK Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Opini BPK	Tahun
WTP	2019
WTP	2020
WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	2021
WTP	2022
WTP	2023

Sumber: opendata.cianjurkab.go.id

Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa meskipun capaian opini BPK Kabupaten Cianjur mengalami tren positif dengan mempertahankan opini WTP dalam beberapa tahun terakhir, namun catatan khusus terkait pengelolaan BMD masih muncul secara konsisten dalam laporan BPK. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme pengelolaan BMD di Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya efektif dalam memastikan ketertiban administrasi, akurasi data, serta pelaporan aset yang akuntabel.

Lebih lanjut, berdasarkan data realisasi anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Cianjur, nilai investasi aset tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2**Data BMD Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2023**

Jenis Aset Tetap	Tahun (Rp.)		Selisih (Rp.)
	2022	2023	
Tanah	1.371.252.390.640,00	1.385.923.956.267,00	14.671.565.627,00
Peralatan dan Mesin	1.729.253.446.574,65	1.862.976.987.280,63	133.723.540.705,98
Gedung dan Bangunan	2.439.720.309.867,70	2.568.522.620.981,60	128.802.311.113,90
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.124.126.364.654,27	3.366.560.861.352,27	242.434.496.698,00
Aset Tetap Lainnya	385.176.213.461,31	400.784.931.908,31	15.608.718.447,00
Jumlah	5.783.468.661.856,30	5.988.748.103.071,54	205.279.441.215,24

Sumber: opendata.cianjurkab.go.id

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke 2023. Namun demikian, peningkatan nilai aset ini tidak sejalan dengan keakuratan pencatatan dan ketertiban administrasi pengelolaan BMD yang dilaporkan oleh BPK.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat gap penelitian berupa lemahnya implementasi sistem informasi pengelolaan aset secara digital di Kabupaten Cianjur. Selama ini pengelolaan BMD masih menggunakan sistem manual dan aplikasi SIMDA BMD yang memiliki berbagai keterbatasan, di antaranya keterlambatan input data, tidak realtime, serta minimnya transparansi data antar-perangkat daerah.

Melihat keberhasilan implementasi aplikasi e-BMD di beberapa daerah seperti Kota Bogor dan Depok, Kabupaten Cianjur memiliki peluang besar untuk memperbaiki tata kelola asetnya melalui digitalisasi sistem pengelolaan BMD. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah proses implementasi e-BMD di Kabupaten Cianjur, termasuk analisis hambatan dan strategi optimalisasinya.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian ini terletak pada belum optimalnya implementasi aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur, serta perlunya kajian akademik untuk mengevaluasi proses, kendala, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah melalui digitalisasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) serta penerapan sistem informasi berbasis digital untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian Yurika Aulia (2024) berjudul *“Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang”* menemukan bahwa penerapan akuntabilitas masih terkendala aspek pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya digital sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan (Yurika Aulia, 2024).

Selanjutnya, penelitian Fitra Ananda Dahlan (2021) berjudul *“Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Provinsi Sulawesi Utara”* menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan BMD belum optimal khususnya dalam kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset (Ananda Dahlan & Runtu, 2023). Hajar Aswad (2023) dalam penelitian berjudul *“Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes”* menyimpulkan

bahwa digitalisasi keuangan desa berdampak positif terhadap akuntabilitas, namun masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan SDM (Aswad et al., 2023).

Fauzan Fadillah Di Harjo dan Desfina (2024) dalam *“Analisis Penerapan Aplikasi SIMDA BMD dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai di BKAD Kabupaten Bintan”* menemukan bahwa aplikasi SIMDA BMD membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset, meskipun masih menghadapi permasalahan teknis serta keterbatasan infrastruktur (Fadillah et al., 2024). Sementara itu, Muhamad Fadhil (2022) dalam *“Analisis Faktor-Faktor Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Aplikasi e-BMD di Bukittinggi”* menyatakan bahwa keberhasilan e-BMD dipengaruhi oleh kesiapan SDM, infrastruktur, dan gaya kepemimpinan (Fadhil, 2022).

Penelitian Missi Injilia Lolowang (2024) berjudul *“Implementation of Regional Asset Accounting Information System in Manado City Government”* menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi aset di Manado sudah sesuai ketentuan, namun masih membutuhkan penguatan dalam pelaksanaan lapangan. Terakhir, Tumija dalam *“Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di BKAD Kota Semarang”* menunjukkan bahwa SIPD mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah meskipun masih menghadapi kendala teknis dalam penerapannya (Tumija et al., 2024).

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi administrasi pemerintahan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sistem keuangan daerah secara umum atau pada tahap kesiapan implementasi. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi aplikasi e-BMD pasca Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 di Kabupaten Cianjur, berikut hambatan teknis, SDM, dan strategi optimalisasinya di lapangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya baik dari sisi objek, konteks, maupun pendekatan yang digunakan. Fokus penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi aplikasi e-BMD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Cianjur, yang hingga saat ini belum pernah dikaji secara spesifik dalam penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian Yurika Aulia (2024) yang hanya membahas transparansi keuangan daerah, serta Fitra Ananda Dahlan (2021) dan Fauzan Fadillah Di Harjo (2024) yang berfokus pada evaluasi penatausahaan BMD konvensional dan SIMDA BMD, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan aplikasi e-BMD berbasis web sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga tidak sama dengan Muhamad Fadhil (2022) yang hanya meneliti kesiapan penerapan e-BMD, karena penelitian ini langsung mengevaluasi proses implementasi di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta strategi penyelesaiannya di BKAD Kabupaten Cianjur. Keunggulan lain terletak pada metode yang digunakan, yakni kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, berbeda dari penelitian terdahulu yang mayoritas menggunakan kuantitatif atau mix methods. Di sisi teori, penelitian ini menerapkan Teori Implementasi dari Nilsen (2015) dan Teori Akuntabilitas dari Mahmudi (2019) yang belum pernah dipadukan secara bersamaan dalam penelitian serupa, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi sistem informasi aset daerah berbasis digital dalam kerangka kebijakan daerah berbasis akuntabilitas publik.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi aplikasi e-BMD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Cianjur, mengetahui dan menganalisis berbagai faktor penghambat yang dihadapi selama proses penerapan aplikasi tersebut, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dalam mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena sosial atau kondisi nyata di lapangan, dengan maksud untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan mengklarifikasi peristiwa atau kenyataan sosial yang terjadi. Metode ini berbasis pada paradigma postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci yang melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung (Sugiyono, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Simangungsong (2017) dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur, khususnya pada bidang yang terkait langsung dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Selanjutnya, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap delapan orang informan, yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, Kepala Bidang Pengelolaan BMD, Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Barang, Kepala Sub Bidang Pelaporan, Kepala Sub Bagian Program, serta tiga orang staf pengelola BMD. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan aset daerah dan penggunaan aplikasi e-BMD.

Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti data nilai aset tetap Kabupaten Cianjur tahun 2022–2023, laporan hasil pemeriksaan BPK, dokumentasi implementasi e-BMD, serta peraturan daerah dan peraturan teknis terkait pengelolaan BMD. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan Teori Implementasi Nilsen (2015) untuk melihat tahapan pelaksanaan aplikasi e-BMD serta Teori Akuntabilitas Mahmudi (2019) guna mengukur dampak implementasi terhadap akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Aplikasi e-BMD

3.1.1 Karakteristik Intervensi

Karakteristik intervensi dalam implementasi aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur mengacu pada teori *Consolidated Framework for Implementation Research* (CFIR) yang menekankan pentingnya desain teknologi dalam keberhasilan intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik aplikasi e-BMD ditunjukkan dari beberapa aspek, yaitu keakuratan pencatatan dan pelaporan aset, kemudahan monitoring, ketersediaan pelatihan SDM, serta kualitas infrastruktur pendukung.

Pertama, dalam hal keakuratan pencatatan, aplikasi e-BMD memungkinkan verifikasi data secara realtime dan dilengkapi fitur persetujuan sebelum data aset diproses, sehingga kesalahan input dapat diminimalisir. Kedua, fitur dashboard monitoring pada aplikasi memberikan kemudahan bagi pengelola aset dalam memantau status aset, riwayat pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Ketiga, untuk mendukung implementasi sistem ini, dilakukan pelatihan rutin kepada pegawai terkait, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal adaptasi SDM terhadap fitur baru yang terus berkembang. Keempat, dari sisi infrastruktur, implementasi aplikasi e-BMD masih menghadapi kendala pada kapasitas server dan kestabilan jaringan internet di beberapa perangkat daerah.

Selain keunggulan tersebut, implementasi aplikasi ini juga dihadapkan pada tantangan teknis, khususnya saat banyak pengguna mengakses sistem secara bersamaan, yang menyebabkan sistem menjadi lambat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berencana melakukan peningkatan kapasitas server dan optimasi sistem agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih lancar.

3.1.2 Karakteristik Pengguna

Keberhasilan implementasi aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur tidak terlepas dari karakteristik penggunanya. Berdasarkan teori Nilsen (2015), terdapat beberapa aspek penting yang memengaruhi implementasi sistem digital, yaitu tingkat pemahaman SDM, kualitas pelatihan, sikap terhadap aplikasi, serta kesiapan pengguna dalam menerima teknologi baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai BKAD Kabupaten Cianjur sudah cukup memahami prosedur pengoperasian aplikasi e-BMD, meskipun masih terdapat beberapa pegawai yang memerlukan pelatihan lanjutan, khususnya dalam hal fitur-fitur baru.

Pelatihan dilakukan dua kali dalam setahun, namun masih terdapat kebutuhan akan pelatihan tambahan, terutama bagi pegawai baru atau pegawai yang belum familiar dengan aplikasi berbasis web. Selain itu, dukungan teknis dari tim IT BKAD dan komunikasi aktif dengan Kemendagri menjadi faktor penting dalam keberlanjutan implementasi aplikasi ini. Tingkat kesiapan pengguna di Kabupaten Cianjur dinilai cukup baik, karena mayoritas pegawai menyadari bahwa aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan aset daerah.

Dari sisi budaya kerja, penerapan e-BMD mulai membentuk pola kerja yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, menggantikan sistem manual yang sebelumnya memakan waktu dan rentan kesalahan. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik dalam hal pengelolaan BMD.

3.1.3 Lingkungan Organisasi

Lingkungan organisasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur, di mana budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan kesiapan organisasi menjadi faktor utama dalam mendukung adopsi teknologi baru. Meskipun sempat mengalami resistensi awal, proses pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan telah membantu meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan aplikasi ini (BKAD Cianjur, 2025). Selain itu, struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik serta dukungan penuh dari pimpinan, khususnya Kepala BKAD, menjadi kunci dalam memastikan implementasi aplikasi e-BMD berjalan sesuai rencana dan terintegrasi ke dalam proses kerja harian. Sistem kontrol akses yang diterapkan secara ketat di dalam aplikasi juga berperan penting dalam menjaga keamanan data aset daerah, membatasi akses pengguna sesuai kewenangannya, dan meminimalisir potensi penyalahgunaan informasi sensitif. Secara keseluruhan, lingkungan organisasi yang adaptif, didukung struktur organisasi yang solid, kebijakan pimpinan yang progresif, serta sistem kontrol akses yang efektif telah mempercepat adopsi teknologi e-BMD di Kabupaten Cianjur (BKAD Cianjur, 2025).

3.1.4 Proses Implementasi

Proses implementasi aplikasi e-BMD di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur merupakan tahapan krusial dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang dilaksanakan melalui lima tahap utama, yaitu perencanaan, pelatihan, uji coba, monitoring berkelanjutan, serta evaluasi dan perbaikan sistem. Berdasarkan teori Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR), keberhasilan implementasi memerlukan pendekatan terencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tahap perencanaan diawali dengan analisis kebutuhan aplikasi dan kesiapan SDM, diikuti pelatihan bertahap untuk seluruh pengguna guna memastikan pemahaman sistem secara menyeluruh (BKAD Cianjur, 2025). Setelah itu, dilakukan uji coba sistem untuk menguji stabilitas fitur sebelum diterapkan penuh, dilanjutkan dengan monitoring berkelanjutan untuk memastikan kelancaran operasional dan penanganan kendala teknis. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menerima masukan dari pengguna terkait peningkatan fitur, kecepatan akses data, serta penyempurnaan antarmuka aplikasi. Proses ini secara keseluruhan mendukung terciptanya sistem pengelolaan aset daerah yang lebih akurat, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

3.1.5 Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memastikan keberhasilan implementasi aplikasi e-BMD di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur. Proses evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai performa aplikasi, efektivitas pengelolaan data aset, dan keterhubungan data antarunit kerja. Kepala BKAD (18 Februari 2025) menyatakan bahwa evaluasi minimal dilaksanakan setiap semester, dilengkapi audit internal guna memastikan kesesuaian antara data sistem dengan kondisi fisik aset di lapangan. Selain itu, pengumpulan umpan balik dari pengguna dilakukan melalui forum diskusi, wawancara, dan survei untuk mengetahui kendala operasional serta usulan pengembangan fitur. Menariknya, penelitian Ahola (2024) menyebutkan bahwa keterlibatan pengguna aktif dalam evaluasi sistem informasi publik merupakan faktor determinan keberhasilan implementasi sistem di sektor pemerintahan daerah, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pengelolaan aset dan pengambilan keputusan berbasis data yang terintegrasi (Ahola et al., 2024).

Hasil evaluasi e-BMD di Kabupaten Cianjur menemukan tantangan pada aspek teknis seperti kecepatan akses data dan kestabilan jaringan, sementara dari sisi pengguna, masih terdapat kebutuhan pelatihan lanjutan untuk beberapa fitur. Tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut dilakukan melalui pembaruan sistem, perbaikan fitur yang kurang optimal, serta penguatan kontrol akses dan integrasi sistem antardinas. Kepala BKAD (22 Februari 2025) menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pengembang aplikasi untuk peningkatan performa dan kemudahan navigasi antarmuka. Temuan ini sejalan dengan riset Ani (2025) yang menekankan pentingnya evaluasi berkala dan respon cepat terhadap masukan pengguna sebagai kunci keberlanjutan aplikasi manajemen aset berbasis digital di lingkungan pemerintahan daerah (Hairudin et al., 2025).

3.2. Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan BMD Setelah Implementasi e- BMD

3.2.1 Tanggung Jawab Pelaporan

Implementasi aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur secara signifikan telah meningkatkan kejelasan dan efisiensi tanggung jawab pelaporan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sebelum diterapkan, pelaporan aset masih dilakukan secara manual, rentan kesalahan, dan memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan hadirnya aplikasi e-BMD, proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time. Kepala BKAD Kabupaten Cianjur dalam wawancara pada 18 Februari 2025 menegaskan bahwa sistem ini membantu memastikan keakuratan pencatatan dan pelaporan aset daerah karena seluruh data terintegrasi dan diperbarui secara langsung, meminimalisir risiko kesalahan input manual. Sejalan dengan hasil penelitian Roje (2014) yang menyatakan bahwa sistem informasi aset yang terintegrasi mampu meningkatkan keandalan pelaporan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tetap (Roje et al., 2014).

3.2.2 Akuntabilitas Keuangan

Selain berdampak pada pelaporan aset, penerapan aplikasi e-BMD juga berperan besar dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaporan aset tetap sebagai bagian dari laporan keuangan daerah. Kepala Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam wawancara pada 19 Februari 2025 menjelaskan bahwa e-BMD memudahkan integrasi data keuangan terkait aset, mempercepat proses pelaporan, dan mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual. Keberadaan fitur validasi dan verifikasi dalam aplikasi turut memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, terstruktur, dan sesuai regulasi seperti Permendagri No. 47 Tahun 2021. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nawipa (2024) yang membuktikan bahwa penerapan sistem informasi berbasis digital seperti e-BMD meningkatkan efisiensi, akurasi laporan, dan akuntabilitas pengelolaan aset di lingkungan pemerintah daerah (Nawipa, Y. (2024).

3.2.3 Pengawasan Aktif

Pengawasan aktif menjadi faktor fundamental dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Cianjur, dengan implementasi fitur audit trail dalam aplikasi e-BMD yang mampu merekam setiap aktivitas pengguna, memudahkan pelacakan, dan meminimalisasi risiko manipulasi data. Kepala BKAD Kabupaten Cianjur dalam wawancara pada 18 Februari 2025 menegaskan bahwa audit rutin dilakukan dengan membandingkan data sistem dan kondisi fisik aset secara langsung di lapangan. Selain itu, sistem e-BMD menyediakan notifikasi otomatis atas transaksi tertunda dan laporan pengawasan berkala yang membantu pimpinan mengambil langkah cepat jika ditemukan ketidaksesuaian data. Praktik ini sejalan dengan hasil penelitian Pattawe (2022) yang menegaskan bahwa internal control system dengan audit trail mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi manajemen aset pemerintah daerah secara signifikan (Pattawe et al., 2022).

3.3. Kendala dalam Implementasi Aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur

Dalam pelaksanaannya, aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur menghadapi berbagai kendala strategis yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan SDM menjadi hambatan utama karena tidak semua pegawai mampu mengoperasikan fitur aplikasi secara optimal, meskipun pelatihan telah rutin dilakukan. Kepala Bidang Aset Daerah dalam wawancara 19 Februari 2025 menyebutkan bahwa kendala ini berdampak pada lambannya input data dan proses pelaporan. Selain itu, konektivitas internet yang belum stabil di beberapa wilayah menghambat operasional aplikasi, terutama saat beban kerja meningkat. Kendala teknis pada beberapa fitur aplikasi, serta lambatnya proses migrasi data dari SIMDA ke e-BMD akibat perbedaan format dan volume data besar, juga menjadi tantangan. Studi oleh Pekei (2014) menguatkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi aset daerah sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, infrastruktur, dan proses migrasi data yang terstruktur agar integrasi sistem berjalan efektif (Pekei, B., Hadiwidjojo, D., & Djumahir, S. 2014).

3.4. Upaya yang Dilakukan BKAD Kabupaten Cianjur

BKAD Kabupaten Cianjur menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi berbagai kendala implementasi e-BMD dengan mengoptimalkan beberapa strategi kunci. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan teknis berkelanjutan yang dilakukan minimal dua kali setahun. Kepala BKAD Kabupaten Cianjur dalam wawancara 18 Februari 2025 menyebutkan bahwa pelatihan tambahan diberikan untuk pegawai baru agar adaptasi terhadap sistem digital berjalan merata.

Selain itu, BKAD melakukan perbaikan infrastruktur jaringan di seluruh unit kerja guna menjaga kestabilan konektivitas aplikasi berbasis web ini. Peningkatan kualitas internet dan pembaruan perangkat keras menjadi langkah penting, sejalan dengan rekomendasi studi Khoueiry (2021) yang menyatakan bahwa kesiapan infrastruktur IT menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi sistem manajemen aset di sektor publik (Khoueiry, R., Khalil, R., Al Harake, 2021).

Di sisi lain, BKAD juga melakukan evaluasi sistem dan intensif berkoordinasi dengan tim pengembang aplikasi guna menyelesaikan bug teknis yang muncul pada beberapa fitur seperti pengadaan dan hibah. Kepala Bidang Aset Daerah dalam wawancara 19 Februari 2025 menyampaikan bahwa penyempurnaan sistem dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pengguna dan temuan audit internal. Tak hanya itu, sosialisasi kepada perangkat daerah dan masyarakat juga rutin dilakukan agar semua pihak memahami pentingnya sistem digital dalam pengelolaan BMD. Strategi ini sejalan dengan riset Hapsari (2022) yang menegaskan bahwa penerimaan teknologi informasi di pemerintahan sangat bergantung pada kualitas pelatihan, kesiapan SDM, dan keterlibatan stakeholder (Hapsari, R., Nugroho, Y., Rahayu, 2022).

3.5. Evaluasi Implementasi dan Dampaknya

Evaluasi terhadap implementasi e-BMD di Kabupaten Cianjur sangat penting untuk memastikan tujuan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan BMD dapat tercapai. Berdasarkan wawancara Kepala BKAD pada 18 Februari 2025, pelatihan teknis pegawai dan migrasi data dilakukan bertahap disertai supervisi ketat. Meski demikian, masih dijumpai kendala teknis seperti kestabilan sistem saat akses bersamaan dan keterbatasan pemahaman fitur aplikasi oleh sebagian pengguna. Temuan ini selaras dengan studi dari Purnomo (2023) yang menyebutkan bahwa kendala teknis dan kesiapan SDM menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem informasi di sektor publik (Purnomo, H., Sari, N. P., Wijayanti, 2023).

Dampak positif mulai terlihat dari efisiensi pencatatan aset dan percepatan pelaporan keuangan. Fitur approval dan validasi data membantu mengurangi kesalahan pelaporan, serta akses real-time memungkinkan perangkat daerah dan auditor memantau kondisi aset secara lebih akurat. Menurut data wawancara 19 Februari 2025, fitur notifikasi turut mempercepat tindak lanjut atas transaksi tertunda. Evaluasi dari pengguna menunjukkan 69,1% responden merasa e-BMD cukup efektif dalam meningkatkan akuntabilitas, meskipun 54,4% di antaranya masih mengalami gangguan teknis. Studi dari Yusof (2022) memperkuat bahwa sistem informasi yang diintegrasikan dengan audit trail dan notifikasi transaksi efektif mendorong transparansi aset pemerintah (Roje et al., 2014).

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Selama pelaksanaan penelitian ini, penulis menemukan bahwa implementasi aplikasi e-BMD di Kabupaten Cianjur telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Edison Aprilio Ayomi, Lintje Kalangi, dan Dhullo Afandi (2022) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan BMD, khususnya aset tanah, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan masih terdapat ketidaksesuaian data. Di Kabupaten Cianjur, penggunaan e-BMD telah memungkinkan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara digital dan terintegrasi, meskipun masih terdapat beberapa hambatan teknis dan sumber daya.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Muhamad Fadhil dkk. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan aset melalui aplikasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan stabilitas infrastruktur. Di Kabupaten Cianjur, pelatihan

berkelanjutan dan dukungan teknis telah menjadi salah satu prioritas BKAD dalam mengoptimalkan penggunaan e-BMD. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Risma Saragih (2018) yang menyebutkan bahwa kurangnya pelaksanaan inventarisasi dan keterbatasan sumber daya pengelola menjadi penyebab tidak efektifnya penatausahaan aset di beberapa daerah, penelitian ini menunjukkan bahwa proses inventarisasi aset di Kabupaten Cianjur sudah berjalan cukup baik seiring dukungan teknologi dan pengawasan berkala.

Selanjutnya, temuan ini juga memperkaya penelitian sebelumnya oleh Fauzan Fadillah Di Harjo dan Desfina (2024) yang menyoroti kendala teknis dalam penggunaan SIMDA BMD di Kabupaten Bintan. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, kendala teknis memang masih dijumpai, khususnya dalam proses migrasi data dan kestabilan fitur aplikasi e-BMD, namun proses perbaikan dan koordinasi dengan tim pengembang telah dilakukan secara rutin. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari BKAD untuk menyempurnakan sistem yang digunakan. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa digitalisasi pengelolaan aset, apabila didukung oleh kebijakan, pelatihan, serta infrastruktur yang memadai, mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMD di lingkungan pemerintahan daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi aplikasi e-BMD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Cianjur telah berjalan cukup efektif dan membawa dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas, efisiensi, serta transparansi pengelolaan aset daerah. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk beralih dari sistem manual dan SIMDA ke sistem digital berbasis web sesuai amanat Permendagri No. 47 Tahun 2021. Aplikasi e-BMD memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, dan pemantauan aset dilakukan secara real-time, yang turut mempermudah proses audit serta mempercepat penyusunan laporan aset pemerintah daerah. Meski begitu, hasil penelitian ini juga menemukan adanya hambatan, baik dari aspek teknis seperti ketidakstabilan koneksi internet dan fitur aplikasi yang belum sepenuhnya optimal, maupun dari aspek sumber daya manusia yang belum seluruhnya memahami fitur-fitur aplikasi secara maksimal. Kondisi ini diperparah dengan masih kurangnya intensitas sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cianjur telah melaksanakan berbagai langkah perbaikan, di antaranya menyediakan pelatihan rutin dan pelatihan tambahan bagi pegawai baru, melakukan perbaikan teknis dan peningkatan koneksi internet, serta melakukan evaluasi sistem secara berkala yang disertai pengumpulan umpan balik dari pengguna untuk pengembangan aplikasi ke depan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadhil (2022) yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi aset daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM dan dukungan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini juga memperluas bukti empiris terkait praktik digitalisasi pengelolaan BMD di tingkat pemerintah daerah, yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada sistem informasi keuangan umum.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dari segi waktu pengumpulan data yang cukup singkat serta ruang lingkup penelitian yang hanya terbatas pada satu kabupaten dan institusi, yakni BKAD Kabupaten Cianjur. Selain itu, data yang diperoleh masih didominasi oleh informasi kualitatif melalui wawancara dan observasi, sehingga belum dilengkapi dengan analisis kuantitatif terkait efektivitas aplikasi e-BMD terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis merekomendasikan agar ke depan dapat dilakukan penelitian lanjutan pada daerah lain yang juga telah menerapkan e-BMD, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas aplikasi ini dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Tidak kalah penting, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji pengaruh integrasi e-BMD dengan aplikasi keuangan daerah lainnya terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Dahlan, F., & Runtu, T. (2023). Evaluation Of The Administration Of Regional Property (Bmd) Based On Permendagri Number 47 Of 2021 At The Regional Development Planning Agency Of North Sulawesi Province. *Januari-Maret*, 8(1), 101–112.
- Aswad, H., Siskawati, E., Jr, S. R., & Meuthia, R. F. (2023). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Nagari: Studi Kasus Pada Nagari Tigo Koto Silungkang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(6), 10935–10945.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. (2022). *Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu TA 2021*. BPK. <https://jabar.bpk.go.id/penyerahan-lhp-atas-lkpd-kabupaten-cianjur-dan-kabupaten-indramayu-ta-2021/>
- Fadhil, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Perihal Pemanfaatan Aplikasi e-BMD Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bukittinggi. *Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 41–57. <https://doi.org/10.30630/jam.v17i2.200>
- Fadillah, F., Harjo, D., Raja, M., Haji, A., Pinang, T., & Maritim Raja, U. (2024). Analisis Penerapan Aplikasi SIMDA BMD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Guna Memaksimalkan Pemanfaatan Aset Daerah (Studi Kasus BKAD Kabupaten Bintan). *Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 2(2), 20–26.
- Hairudin, A. R., Che Ani, A. I., Saiful Bahri, M. A., Abdul Maulud, K. N., & Rahman, M. A. (2025). WebGIS for Urban Building Management: A Case Study of Petaling Jaya City. *Paper Asia*, 41(1), 441–448. <https://doi.org/10.59953/paperasia.v41i1b.196>
- Hapsari, R., Nugroho, Y., Rahayu, D. (2022). Public acceptance of digital transformation in local government: The role of training, readiness, and stakeholder involvement. *Journal of Public Administration Studies*, 45(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JGOSS-05-2021-0023>
- Khoueir, R., Khalil, R., Al Harake, M. (2021). Determinants of IT infrastructure readiness in public sector organizations: Evidence from Lebanon. *Journal of Public Affairs*, 21(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pa.2517>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

- Nilsen, P. (2015). Making sense of implementation theories, models and frameworks. *Implementation Science*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0242-0>
- Pattawe, A., Haris, N., Natsir, M., . J., . M., Din, M., & Larija, A. G. (2022). Internal Control System between Fraud Asset Management and Local Governance: A Social and Organizational Perspective. *Webology*, 19(1), 5455–5465. <https://doi.org/10.14704/web/v19i1/web19366>
- Purnomo, H., Sari, N. P., Wijayanti, D. (2023). Barriers to e-Government Implementation in Indonesia's Public Sector: Evidence from Local Government Institutions. *Public Sector Innovations Journal*, 39(2), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2108379>
- Roje, G., Vašiček, V., & Vašiček, D. (2014). Accounting and accountability in public sector asset management: the role of central asset register in consolidating, reporting and utilizing fixed assets in *ELASM Public sector management* <https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/HRZZprojekti/Vasicek/EIASM> - 2014, Edinburgh - Full paper.pdf
- Simangunsong, F. (2017). *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Cet. 1). Ghalia Indonesia.
- Sinurat, Marja., & Maurits, Panjaitan. (2017). *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Jakarta: Pustaka Rahmat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Kombinasi Mixed Methods*. ALFABETA.
- Suwanda, Dadang. (2015). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda* (Cetakan Ke). PPM Manajemen.
- Tumija, T., Kogoya, Y. G., & Agustina, I. (2024). Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Jayawijaya. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 11(1), 15–26. <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4149>
- Yurika Aulia. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>

